

LAPORAN AKHIR MAGANG

BAGIAN PENILAIAN KPKNL SURAKARTA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun oleh :

Nama: Setiabudi Yudha Pratama

NIM: 1122 31964

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara YOGYAKARTA

2025

Lembar Pengesahan

TUGAS AKHIR

LAPORAN MAGANG

BAGIAN PENILAIAN KPKNL SURAKARTA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SETIABUDI YUDHA PRATAMA

Nomor Induk Mahasiswa: 112231964

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



Pembimbing

Drs. Deden Iwan Kusuma, M.Si., Ak.

Penguji

Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS., Ak., CA.

Yogyakarta, 30 Januari 2026
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Laporan magang ini disusun sebagai hasil pelaksanaan kerja praktik di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, khususnya pada Bagian Penilaian. Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan teori penilaian aset ke dalam praktik pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan benda sitaan negara. Selama periode magang, penulis terlibat aktif dalam prosedur teknis meliputi survei lapangan, verifikasi fisik objek, pencarian data pembanding pasar, input data ke dalam sistem, serta perhitungan nilai aset menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan biaya. Laporan ini secara spesifik menganalisis tantangan yang dihadapi dalam proses penilaian, antara lain keterbatasan validitas Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) untuk wilayah yang luas, kelangkaan data pembanding untuk properti khusus (Special Purpose Property) seperti kolam renang, serta adanya diskrepansi antara data administratif dengan kondisi fisik aset di lapangan. Sebagai langkah solutif, diterapkan penggunaan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) untuk penyesuaian harga material dan metode penilaian hibrida untuk aset yang tidak memiliki data pasar langsung. Berdasarkan analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa penilaian aset negara yang akuntabel menuntut kombinasi antara kepatuhan terhadap standar regulasi, ketelitian dalam verifikasi fisik, serta adaptabilitas dalam pemilihan metode penilaian yang relevan.

Kata Kunci: Penilaian Aset, KPKNL Surakarta, Barang Milik Negara (BMN), Pendekatan Biaya, Survei Lapangan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This internship report details the practical work conducted at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) Surakarta, specifically within the Valuation Section. The program aimed to implement asset valuation theories into the practical management of State Property (BMN) and state-seized assets. During the internship, the author was actively involved in technical procedures including field surveys, physical object verification, market data research, data entry, and asset value calculation utilizing both market and cost approaches. This report specifically analyzes the challenges encountered during the valuation process, such as the validity limitations of the Building Valuation Component List (DKPB) across extensive regions, the scarcity of comparable data for Special Purpose Properties like swimming pools, and discrepancies between administrative data and actual physical conditions. As a solution, the Construction Cost Index (IKK) was applied for material price adjustments, alongside hybrid valuation methods for assets lacking direct market data. Based on the analysis and discussion, it is concluded that accountable state asset valuation requires a combination of compliance with regulatory standards, precision in physical verification, and adaptability in selecting relevant valuation methods.

Keywords: *Asset Valuation, KPKNL Surakarta, State Property (BMN), Cost Approach, Field Survey.*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Pengelolaan kekayaan negara menjadi krusial bagi suatu negara guna mengoptimalkan pendapatan negara. Kekayaan Negara didefinisikan sebagai segala bentuk kekayaan hayati dan non hayati, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta bertugas mengoptimalkan kekayaan tersebut, di mana properti negara seperti tanah dan bangunan harus dinilai untuk memberikan opini nilai sebelum dilelang atau disewakan guna menambah kas negara.

Penilaian Barang Milik Negara (BMN) diperlukan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penetapan status penggunaan BMN. Bidang penilaian memiliki peran vital dalam mengelola aset negara dan benda sitaan (seperti dari Kejaksaan, Pajak, KPK) untuk memastikan nilai tercatat benar, mencegah kerugian negara, serta mendukung transparansi. Magang kerja menjadi sarana bagi mahasiswa STIE YKPN untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan praktik lapangan, memahami operasional KPKNL, serta aspek regulasi aset negara.

Pelaksanaan magang ini bertujuan untuk:

- 1 Memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi S1 Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta.
- 2 Mengimplementasikan konsep dan teori yang diperoleh selama perkuliahan.
- 3 Meningkatkan kualitas lulusan agar kompetitif di dunia kerja.
- 4 Meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi.
- 5 Mengembangkan keterampilan praktis di lapangan.
- 6 Membantu efektivitas layanan di KPKNL, khususnya bidang penilaian.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

KPKNL Surakarta adalah unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), beroperasi sejak tahun 2001. Kantor ini berlokasi di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 141, Surakarta, dengan wilayah kerja mencakup Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten dan Sragen. Visi KPKNL Surakarta selaras dengan DJKN yaitu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk kemakmuran rakyat. Misinya meliputi optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, pengamanan aset, peningkatan tata kelola, penilaian yang wajar, serta pelaksanaan lelang yang efisien dan transparan. Motto pelayanan yang dianut adalah 'PASTI ISO' (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Integritas, Inovatif, Solusi).

KPKNL Surakarta dipimpin oleh Kepala Kantor (Ibu Diana Setiastanti). Struktur organisasi terdiri dari:

- Subbagian Umum
 - Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN).
 - Seksi Piutang Negara.
 - Seksi Hukum dan Informasi.
 - Seksi Kepatuhan Internal.
 - Kelompok Jabatan Fungsional (Pejabat Lelang, Penilai Pemerintah, Pranata Keuangan).
- Total SDM berjumlah 43 orang per September 2025.

Penulis melaksanakan magang dari 1 September 2025 hingga 8 Desember 2025 di bagian Penilaian. Dengan berbagai rangkaian aktivitas utama meliputi:

1. Mencari Harga Pembanding (Pendekatan Pasar)

- Barang Rampasan Kejari Klaten: Mencari harga pembanding ponsel dan motor menggunakan Facebook Marketplace. Penulis melakukan penyesuaian kondisi barang karena tidak semua dalam kondisi baik.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Bongkaran Gedung RSST Klaten: Melakukan survei langsung ke toko barang bekas/rosok untuk mencari nilai wajar sisa bongkaran gedung.
- Sewa RSUD Bagas Waras Klaten: Survei dan wawancara pemilik ruko/usaha sekitar untuk penilaian sewa kantin, kas bank, dan ATM.
- Barang Rampasan Kejari Sukoharjo: Mencari harga pembanding ponsel, mobil, motor, dan cup sealer menggunakan aplikasi e-commerce (Shopee, Facebook).
- Aset Pemerintah Kota Surakarta: Mencari pembanding dan menganalisis lokasi potensial untuk disewakan (Sekolah Dasar, tanah kosong) menggunakan Google Maps dan Google Earth.
- Kolam Renang Tirtomoyo Jebres: Mencari harga pembanding tanah kosong di sekitar Jebres menggunakan Google Street dan marketplace untuk menentukan nilai sewa tanah .
- Barang Sitaan Kejari Wonogiri: Mencari harga pembanding ponsel dengan mengidentifikasi kriteria dan kondisi barang yang beragam.
- Tanah/Bangunan di Surakarta: Survei langsung mencari harga sewa tanah atau bangunan semi permanen seluas $\pm 12 \text{ m}^2$.

2. Menilai Objek Bangunan

- RSST Klaten (Penghapusan Aset): Survei bangunan yang akan dirobohkan (Gedung Rosela, Geriatri, Isolasi, Perpustakaan, Garasi). Penulis mencatat dan mendokumentasikan barang yang masih bernilai ekonomis.
- RSUD Bagas Waras (Sewa): Mengukur luas bangunan dan wawancara nilai sewa sekitar untuk menentukan nilai wajar.
- Pemkot Surakarta: Survei tanah kosong, gedung parkir, dan SD untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penulis mendokumentasikan objek penilaian.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Kolam Renang Tirtomoyo Jebres: Survei aset milik PDAM Toya Wening yang sudah tidak beroperasi. Penulis mengukur luas tanah/bangunan dan mengecek kesesuaian via Google Earth .
- Barang Sitaan KPK: Survei objek rumah sitaan KPK untuk dilelang. Penulis mengukur bangunan dan mencari harga pembandingan di sekitar lokasi .
- Perumda Pedaringan: Survei lahan untuk sewa gudang, melakukan dokumentasi dan pengukuran .
- Terminal Ir. Soekarno Klaten: Survei penilaian sewa resto, kios, dan lahan kosong. Penulis mendokumentasikan dan mengukur 11 objek.

3. Menilai Objek Selain Bangunan

- Kementan Sukoharjo: Cek fisik 54 unit motor (Thunder dan Arashi) untuk penghapusan. Ditemukan ketidaksesuaian data nomor rangka, mesin, dan plat nomor antara data administratif dan fisik.
- Kejari Klaten: Survei barang rampasan berupa tas selempang, ponsel, motor, dan printer untuk dilelang.

4. Pascapenilaian

- Input Data: Memasukkan data hasil cek fisik (kendaraan Kementan, RSST Klaten) ke formulir .
- Rekonsiliasi Laporan: Memeriksa kesesuaian laporan penilaian Kementan Sukoharjo.
- Kertas Kerja Analisis Perhitungan (KKAP): Mengisi KKAP untuk Kejari Sukoharjo, Wonogiri, dan Klaten, termasuk memasukkan data pembandingan, menyesuaikan kondisi barang (misal: kondisi ponsel), dan dokumentasi foto .

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Input Data Survei Harga: Memasukkan data harga material, sewa alat, dan upah pekerja wilayah Surakarta ke web SSO Kemenkeu.
- Pembuatan Denah: Membuat denah Terminal Ir. Soekarno dan menganalisis kesesuaian luas objek dengan permohonan .
- Perhitungan Nilai Bangunan (Pendekatan Biaya): Menghitung nilai bangunan SD menggunakan DKPB, menyesuaikan kondisi fisik dengan standar material.
- Menghitung nilai Kolam Renang Tirtomoyo Jebres dengan menyelaraskan kondisi fisik dan standar material DKPB .
- Drafting Laporan: Input data administratif (nomor surat, tanggal, narasi) ke draft laporan penilaian.
- Input SIP DJKN: Input data sewa ATM BNI di Surakarta sebagai data pembanding.

5. Aktivitas Lain (Divisi Umum & Arsip)

- Arsip Berkas Lelang: Menyusun berkas berdasarkan nomor/tanggal, cek kelengkapan (risalah lelang), penomoran kotak, dan pemindahan ke gudang (minuta lelang).
- Cek Dokumen Gudang: Memeriksa status laku/TAP, jenis lelang eksekusi/non-eksekusi.
- Pemeriksaan Kelengkapan: Memastikan dokumen yang dipinjam pegawai telah kembali ke box arsip .

6. Tugas Khusus

- Mengubah format PMK 99 tahun 2024 tentang Penilaian menjadi format Bultek agar lebih mudah dipelajari.
- Mendokumentasikan (scan) buku KJPP Sih Wiryadi & Rekan terkait laporan penilaian properti.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LANDASAN TEORI

Pengertian Penilaian Penilaian adalah serangkaian aktivitas untuk menghasilkan opini nilai terhadap suatu objek pada waktu tertentu. Proses ini harus mematuhi Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan peraturan perundang-undangan. Penilai adalah pihak yang kompeten dan independen dalam melakukan penilaian. Prosesnya meliputi identifikasi permohonan, pengumpulan data, analisis, penetapan pendekatan, hingga penyusunan laporan .

Pendekatan Penilaian Pemerintah Terdapat tiga pendekatan utama dalam penilaian properti:

- 1 Pendekatan Pasar digunakan untuk mengestimasi nilai wajar dengan membandingkan objek penilaian dengan objek sejenis yang telah terjual atau ditawarkan. Syarat utamanya adalah karakteristik yang sejenis dan sebanding (apple-to-apple).
- 2 Pendekatan Biaya digunakan terutama untuk BMN gedung/bangunan. Nilai ditentukan dengan menghitung Biaya Penggantian Baru (New Replacement Cost) dikurangi penyusutan. Dasarnya adalah prinsip substitusi, di mana pembeli tidak akan membayar lebih dari biaya membuat aset pengganti dengan utilitas setara.
- 3 Pendekatan Pendapatan digunakan untuk mengestimasi nilai dengan mengkapitalisasi aliran pendapatan masa depan dari aset (misal: metode arus kas terdiskonto/DCF). Cocok untuk aset produktif yang memenuhi prinsip Highest and Best Use (HBU).

Proses akhir dalam penilaian adalah membuat laporan penilaian. Laporan Penilaian adalah dokumen akhir dari penilai pemerintah. Jenis nilai dalam laporan meliputi:

Nilai Wajar: Estimasi harga dari transaksi teratur antar pelaku pasar.

Nilai Pasar: Estimasi uang yang dapat direalisasikan dari pertukaran aset pada tanggal penilaian antara pembeli dan penjual yang berminat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nilai Likuidasi: Taksiran nilai properti yang dijual melalui lelang dengan memperhitungkan faktor risiko penjualan paksa.

Objek dan Tujuan Penilaian Tujuan penilaian meliputi penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengelolaan benda sitaan, serta penyelesaian piutang negara melalui lelang atau penebusan . Objek penilaian di KPKNL juga mencakup Aset Tak Berwujud (ATB).

Konsep Aset dan BMN Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar (likuid <12 bulan) dan tidak lancar (jangka panjang). BMN adalah aset yang dibeli dari APBN atau perolehan lain yang sah. Termasuk di dalamnya adalah Barang Rampasan Negara (berasal dari putusan pengadilan) dan Barang Gratifikasi (ditetapkan oleh KPK).

Depresiasi dan Biaya Depresiasi adalah penyesuaian biaya penggantian aset untuk mencerminkan penurunan nilai akibat keusangan. Biaya dikategorikan menjadi biaya langsung (mudah diidentifikasi ke objek) dan biaya tidak langsung (sulit dialokasikan langsung).

Permasalahan Selama pelaksanaan magang, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan krusial:

- 1 Masalah Terkait DKPB (Daftar Komponen Penilaian Bangunan): Validitas data referensi harga satuan sering tersentralisasi di Kota Surakarta, padahal wilayah kerja mencakup 6 kabupaten lain. Hal ini memicu disparitas harga karena biaya di pusat kota berbeda dengan daerah seperti Wonogiri atau Sragen, berisiko mendistorsi Nilai Wajar .

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 2 Kesulitan Mencari Harga Pembanding: Resistensi dan kurangnya transparansi dari narasumber (pemilik properti) saat wawancara harga transaksi riil. Ketersediaan objek pembanding yang comparable di lokasi berdekatan juga minim.
- 3 Komponen Material Tidak Ada di DKPB: Terdapat ketidaksesuaian nomenklatur material bangunan tua dengan katalog material modern di DKPB, menyulitkan harmonisasi data.
- 4 Menyesuaikan KKAP (Kertas Kerja Analisis Perhitungan): Kesulitan mencari pembanding apple-to-apple untuk aset elektronik (HP) di Kejari yang kondisinya heterogen (rusak, baterai bocor, mati total, atau barang tiruan/palsu). Data pasar untuk barang "minus" sangat langka .
- 5 Ketidaksesuaian Data Administratif dan Fisik: Sering terjadi inkompatibilitas antara data di surat permohonan dengan hasil survei lapangan, terutama pada variabel luas tanah dan bangunan .
- 6 Special Purpose Property: Kasus penilaian Kolam Renang Tirtomoyo Jebres yang merupakan properti khusus dan idle. Tidak ada data transaksi sewa objek sejenis di wilayah tersebut, sehingga metode perbandingan data pasar sulit diterapkan secara langsung.

Pembahasan dan Solusi:

- 1 Solusi Masalah DKPB: Penerapan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari BPS atau data internal DJKN sebagai koefisien penyesuaian. Mengalikan biaya dasar DKPB Surakarta dengan indeks wilayah setempat mengeliminasi distorsi harga geografis .
- 2 Strategi Mencari Harga Pembanding: Melakukan ekstensifikasi observasi profil target pasar sekitar dan membuat database pembanding per wilayah kerja untuk mempermudah penemuan data referensi yang representatif .

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 3 Penanganan Material Non-DKPB: Melakukan mekanisme penyesuaian (adjustment) teliti untuk memilih komponen substitusi yang merepresentasikan kualitas nilai intrinsik material eksisting guna mereduksi deviasi nilai .
- 4 Penyesuaian KKAP Aset Elektronik: Menyeleksi pembanding yang paling relevan (minimal dua objek serupa) atau mengambil batas bawah harga pasar. Angka bukan harga penawaran mentah, melainkan hasil analisis kondisi fisik untuk menghindari overvalue (tidak laku lelang) atau undervalue (kerugian negara).
- 5 Koreksi Data Fisik: Melakukan koreksi luas berdasarkan pengukuran riil di lapangan. Jika penilaian diteruskan tanpa koreksi, berisiko merugikan negara (jika luas riil > data) atau ketidakadilan bagi penyewa (jika luas riil < data).
- 6 Metode Hibrida untuk Properti Khusus: Menerapkan metode penilaian campuran untuk Kolam Renang Tirtomoyo. Komponen tanah dinilai dengan Pendekatan Pasar (data tanah kosong), sedangkan fisik bangunan dan instalasi dinilai dengan Pendekatan Biaya (Cost Approach).

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN REFLEKSI DIRI

Kesimpulan Praktik kerja di KPKNL Surakarta memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan aset negara. Simpulan utamanya adalah perlunya adaptabilitas dalam implementasi metode penilaian. Kasus Kolam Renang Tirtomoyo membuktikan bahwa penilai harus tajam menganalisis dan memodifikasi metode (hibrida) saat data pasar terbatas . Reliabilitas data referensi sangat vital; bias harga geografis pada DKPB dapat diatasi dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Selain itu, integritas dalam verifikasi fisik adalah garda terdepan memitigasi kerugian negara, terbukti dari temuan diskrepansi spesifikasi kendaraan di Kementan Sukoharjo. Penilaian aset negara adalah sinergi antara kepatuhan regulasi, analisis tajam, dan disiplin verifikasi lapangan .

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rekomendasi Bagi KPKNL Surakarta:

Bank Data Internal: Menginisiasi pembangunan database terstruktur berisi riwayat transaksi dan penawaran sewa per zonasi (Klaten, Wonogiri, dll) untuk mengatasi masalah data pembanding properti khusus.

Katalog Material: Membuat panduan teknis padanan spesifikasi material lama ke pos biaya DKPB untuk menstandarisasi persepsi penilai dan meminimalisir bias perhitungan NRC.

Bagi STIE YKPN Yogyakarta:

Simulasi Kasus Nyata: Mengadopsi simulasi kasus dengan data tidak lengkap/ambigu (barang rusak/palsu) di perkuliahan untuk melatih nalar kritis mahasiswa.

Mata Kuliah Baru: Membuka mata kuliah Manajemen Aset yang mencakup Manajemen Aset Negara dan Appraisal (termasuk penggunaan DKPB dan mekanisme penyusutan) untuk mempercepat adaptasi lulusan.

Bagi Mahasiswa Magang Berikutnya:

Riset Awal: Mempelajari profil dan Tupoksi instansi sebelum mulai bekerja untuk mempercepat adaptasi.

Proaktif: Segera meminta klarifikasi jika instruksi kurang jelas untuk menghindari kesalahan.

Komunikasi Asertif: Berdiskusi dengan pembimbing jika tugas di luar kapasitas teknis.

Refleksi Diri Magang ini meningkatkan kompetensi teknis (hard skill) penulis dalam instrumen pengukuran, interpretasi denah, penggunaan Google Earth, dan SIP DJKN. Kemampuan interpersonal (soft skill) dan kepercayaan diri juga berkembang melalui interaksi dengan stakeholders. Penulis memahami bahwa integritas, presisi, dan filosofi 'PASTI ISO' adalah fondasi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

profesi penilai. Pengalaman ini memotivasi penulis untuk mengejar sertifikasi profesi penilaian di masa depan .



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2021). *COST ACCOUNTING A MANAGERIAL EMPHASIS*.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2024). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - Aset Tetap*.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (n.d.). *KPKNL Surakarta*.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2020). *Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 453 tahun 2020*.
- Istan, M., Dewi, R. K., & Ghoni, M. A. (2021). *ASSET DAN LIABILITY MANAGEMENT BANK*.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.06/2020*.
- Kementerian Keuangan DJKN. (2014). *Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara*.
- Komite Standar Penilaian Indonesia. (2018). *Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII - 2018*.
- Pemerintah Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Resia, E. (2021). *Pendekatan Penilaian Properti*.
- Sayyidah, A. N. (2015). *Dinamika Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas di Tempat Magang Kerja (Studi Deskriptif di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta*.